

MANAJEMEN KEPALA SEKOLAH/MADRASAH DALAM SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN

Cipto Handoko

EMAIL: ciptohandoko25@gmail.com

IAI An Nur Lampung, Lampung Selatan, Lampung, Indonesia

Tukiran

EMAIL: tukiran@staff.itera.ac.id

Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Lampung, Indonesia

Diterima: 20/02/2022	Revisi: 25/02/2021	Disetujui: 02/04/2022
-------------------------	-----------------------	--------------------------

ABSTRAK

Manajemen merupakan salah satu unsur yang utama dalam keberhasilan suatu kegiatan, tidak terkecuali dalam bidang Pendidikan. Bantuan Operasional Siswa (BOS) menjadi salah satu bagian dari sekolah untuk dikelola secara optimal untuk memperoleh tujuan Bersama secara maksimal. Tulisan ini bertujuan menganalisa penerapan manajemen keuangan Pendidikan khususnya dalam BOS. Jenis penelitian yang digunakan termasuk penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan etnografi. Hasil penelitian menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan pendidikan sekolah, khususnya pengelolaan dana BOS dilaksanakan dengan beberapa tahapan diantaranya perencanaan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi

Kata Kunci: *Manajemen, Kepala Sekolah, Pengelolaan Keuangan*

ABSTRACT

Management is one of the main elements in the success of an activity, there is no field in the field of Education. Student Operational Assistance (BOS) is one part of the school to be

managed optimally to obtain maximum common goals. This paper aims to implement the application of financial management in education, especially in BOS. The type of research used includes descriptive qualitative research with an ethnographic approach. The results of the study illustrate that in the implementation of school financial management, especially the management of BOS funds, it is carried out in several stages of planning involving various stakeholders, implementation, monitoring and evaluation.

Keywords: Management, Principal, Financial Management

PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas pendidikan bukanlah tugas yang ringan karena tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapi mencakup berbagai persoalan yang sangat rumit dan kompleks, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pendanaan, maupun efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan sistem persekolahan, peningkatan kualitas pendidikan juga menuntut manajemen pendidikan yang lebih baik.

Dalam undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa sumber daya pendidikan adalah merupakan pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang berwujud tenaga, dana, sarana dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan pemerintah, baik sendiri maupun bersama-sama. Manajemen keuangan sekolah perlu memerhatikan sejumlah prinsip. Di antaranya yaitu prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.¹

Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh

¹ Nur Rahmah, "Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Sekolah," *Kelola: Journal of Islamic Education Management* 1, no. 1 (October 25, 2016): 73-77, <https://doi.org/10.24256/kelola.v1i1.430>.

lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (Juknis Penggunaan Dana BOS tahun 2016). Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.²

Pengalokasian dana di dunia pendidikan tidak lain ialah suatu penanaman modal pada pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia tidak mungkin mempunyai keterampilan tinggi tanpa sentuhan pendidikan. Sentuhan pendidikan yang dapat menciptakan keterampilan tinggi tidak mungkin dijalankan apa adanya, dengan pendanaan yang terlalu rendah.

Masalah perluasan kesempatan (akses) merupakan dampak nyata dalam memberikan tempat pada demokratis pendidikan (pendidikan untuk semua) sebagai pendidikan nasional kita selalu dihadapkan pada masalah kualitas dan kuantitas. Masalah kualitas terdesak oleh pemikiran kuantitas, terlebih pada masa krisis ekonomi dimana daya dukung ekonomi keluarga semakin melemah yang mengakibatkan banyak usia sekolah tidak dapat melanjutkan sekolah, meningkatnya putus sekolah. Melemahnya kemampuan menyekolahkan sebagai dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan dapat kita pahami karena struktur pengeluaran sebagian besar adalah untuk kehidupan primer.

Pada awal Juli 2005 (saat itu Dirjennya Prof. Suyanto, Ph.D.), BOS mulai diluncurkan. Awalnya, dana BOS dianggarkan di pusat dan dikelola oleh pusat. Prosesnya berjalan lancar walaupun masih ada pelanggaran dan penyimpangan yang dilalukan di beberapa sekolah. Proses belajar-mengajar pun sudah bisa berjalan normal. Mekanisme pengelolaan dana BOS berubah mulai tahun 2011 dengan pertimbangan untuk menyeimbangkan postur anggaran sesuai asas desentralisasi *money follow function*. Dana BOS pun dimasukkan dalam pengelolaan daerah, sehingga

² Subkhi Widyatmoko and S. Suyatmini, "Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD N Kemasari I Surakarta," *Manajemen Pendidikan* 12, no. 3 (December 28, 2017): 153–60, <https://doi.org/10.23917/jmp.v12i3.5528>.

anggaran BOS masuk sebagai pengeluaran daerah. Aturan baru ini memang agak rumit, prosedurnya lebih panjang karena birokrasinya jadi bertingkat. Dengan sistem baru ini, dana BOS dikelola oleh tiga kementerian, yaitu Kementerian Keuangan bertanggungjawab penyaluran anggaran ke pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri bertanggungjawab atas pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, dan Kementerian Pendidikan bertanggungjawab terhadap peruntukan/penggunaan anggaran. Perubahan besar terjadi pada tahun 2020, di mana dana BOS disalurkan langsung dari Kementerian Keuangan ke sekolah. Tentu ini terobosan luar biasa yang dilakukan pemerintah karena jelas memotong birokrasi yang tadinya sangat rumit. Semoga dengan mekanisme baru ini, tidak ada lagi hambatan penyaluran dana BOS ke sekolah.³

Kepemimpinan kepala sekolah merupakan komponen yang sangat penting, karena kepala sekolah berperan dalam sistem pengelolaan sekolah, mengarahkan dari input, proses dan output pendidikan di sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dengan cara melaksanakan administrasi sekolah dengan seluruh substansinya, disamping itu kepala sekolah bertanggung jawab terhadap kualitas sumber daya yang ada agar mereka mampu menjalankan tugas-tugas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.⁴ Manajemen kepala sekolah sangat dibutuhkan untuk membina dan mengembangkan hubungan kerjasama yang baik antara sekolah dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan sekolah yang efektif dan efisien. Kerjasama dapat dilakukan dengan memberdayakan partisipasi masyarakat atau komite sekolah, sehingga dapat meningkatkan mutu Pendidikan.

³ "Majalah JendelaSejarah Dan Peran BOS Bagi Pendidikan Indonesia," accessed December 6, 2021, <https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/berita/detail/sejarah-dan-peran-bos-bagi-pendidikan-indonesia>.

⁴ Siti Julaiha, "Konsep Kepemimpinan Kepala Sekolah," *Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran* 6, no. 3 (October 10, 2019): 179–90, <https://doi.org/10.21093/twt.v6i3.1734>.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan data deskriptif yang berupa kutipan data, gambar kata-kata tertulis atau lisan dari seseorang atau peristiwa yang diamati. Penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama yaitu untuk menggambarkan dan mengungkapkan (to describe and explore) dan tujuan yang kedua yaitu menggambarkan dan menjelaskan (to describe and explain).⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan etnografi. Metode penelitian kualitatif sering di sebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya di lakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), di sebut juga metode ethnographi.⁶

PEMBAHASAN

1. Perencanaan Keuangan

Perencanaan merupakan langkah awal dalam mengidentifikasi segala kebutuhan organisasi. Perencanaan menentukan untuk apa, dimana, kapan akan dilaksanakan dan bagaimana melaksanakannya. Dalam kegiatan perencanaan anggaran pembiayaan pendidikan, kepala sekolah memiliki kewajiban untuk menggerakkan sumber-sumber pendanaan pendidikan serta menyusun Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS).⁷

Perencanaan pembiayaan merupakan sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujaun, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan tersebut secara menyeluruh. Siswanto (2012) mengemukakan bahwa tahapan-tahapan aktivitas perencanaan meliputi: 1) perkiraan (forecasting), 2) penetapan tujuan (establishing objective), 3) pemograman (programming), 4) penjadwalan (scheduling), 5) penganggaran (budgetting), 6)

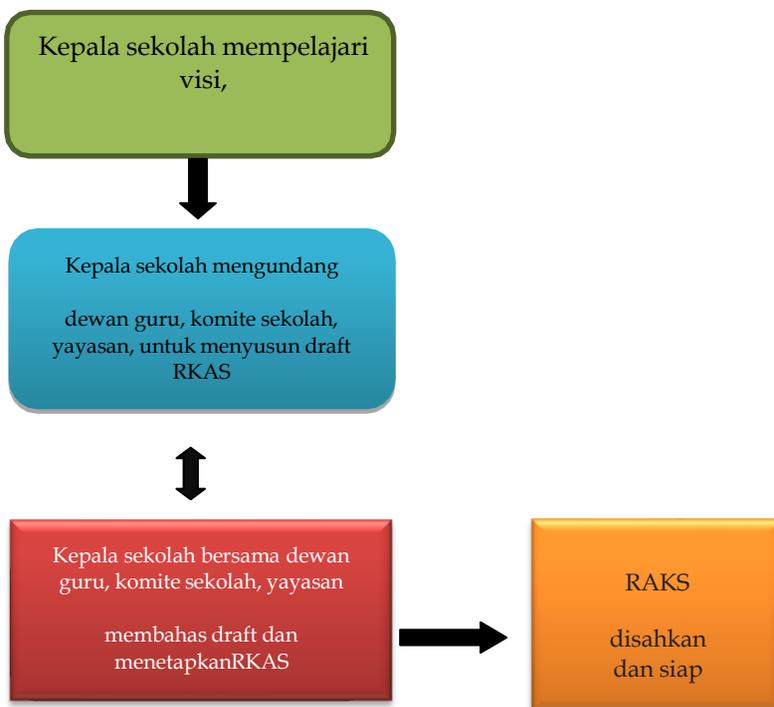
⁵ Sandu Siyoto, Dkk, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publisng, 2015).

⁶ Surahman dkk, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Tim P2M2, 2016).

⁷ Nur Komariah, "KONSEP MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN," *Al-Afkar: Jurnal Keislaman & Peradaban* 6, no. 1 (December 25, 2018): 67-94, <https://doi.org/10.32520/afkar.v6i1.192>.

pengembangan prosedur (developing procedure), 7) penetapan dan interpretasi kebijakan (establishing and interpreting policies).⁸

Perencanaan keuangan sekolah adalah merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah dengan menghimpun sejumlah sumber daya yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan yang berhubungan dengan anggaran sebagai penjabaran suatu rencana dalam bentuk proposal untuk setiap komponen kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1. Sistem Perencanaan Sekolah.



Gambar 1. Sistem Perencanaan Keuangan Sekolah

⁸ Ainul Fitri, Murniati, and Bahrun, "MANAJEMEN KEPALA SEKOLAH DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SMP NEGERI DI KOTA BANDA ACEH," *Jurnal Administrasi Pendidikan : Program Pascasarjana Unsyiah* 7, no. 1 (2019), <http://e-repository.unsyiah.ac.id/JAP/article/view/13175>.

Dalam merencanakan penggunaan dana BOS kepala sekolah terlebih dahulu menyesuaikan dengan rencana pengembangan sekolah secara keseluruhan, baik pengembangan jangka pendek, maupun jangka Panjang.⁹

Proses perencanaan yang dilakukan dimulai dengan rapat bersama yang diadakan oleh kepala sekolah dengan mengundang dewan guru, komite sekolah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta dari pihak yayasan yaitu pimpinan cabang muhammadiyah ujung tanah yang dilaksanakan pada akhir tahun pelajaran untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan dan akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru. Hasil dari rapat tersebut akan dibentuk proposal kebutuhan atau lebih dikenal dengan RKAS (Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah) yang berisi rencana anggaran biaya untuk kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan.

Kepala sekolah dan bendahara sekolah menyusun anggaran berdasarkan hasil rapat. Dalam penyusunan keuangan tidak lepas dari kendala yang ada, adapun kendala yang dihadapi yaitu kebutuhan yang semakin banyak namun dana yang tersedia terbatas. Sehingga untuk menghadapi kendala tersebut kepala sekolah menggunakan skala prioritas. Kebutuhan yang sangat mendesak maka kebutuhan tersebut yang didahulukan.

Perencanaan penganggaran memungkinkan manajemen sekolah dapat memplaning kegiatan pembelajaran dalam rentan waktu tertentu untuk menghasilkan keuangan yang sehat. Dengan adanya penganggaran keuangan akan memunculkan keputusan keuangan dari ingatannya pemangku kebijakan. Serta dapat menjadi penghubung antara waga dan pemangku kepentingan lainnya.¹⁰

⁹ Afrilliana Fitri, "PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SEKOLAH DASAR NEGERI KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN KOTA BUKITTINGGI," *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan* 2, no. 1 (March 4, 2020): 33–39, <https://doi.org/10.24036/bmp.v2i1.3753>.

¹⁰ Muna Aziza Muhtar, Taufik Bk, and H. Akil, "PERENCANAAN KEUANGAN SEKOLAH DAN UPAYA PERBAIKAN SISTEM MANAJEMEN KEUANGAN DI RA-ABATA MARDHOTILLAH," *PeTeKa* 4, no. 3 (November 2, 2021): 524–31, <https://doi.org/10.31604/ptk.v4i3.524-531>.

2. Pelaksanaan Keuangan

Pelaksanaan keuangan adalah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian bila diperlukan. Pelaksanaan dalam manajemen keuangan terbagi atas proses mengelola penerimaan dan pengeluaran. Proses pelaksanaan keuangan pada segi penerimaan, sumber keuangan sekolah berasal dari yayasan dan pemerintah yaitu dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana pendidikan gratis. Selain dari kedua sumber keuangan tersebut sekolah tidak menerima dari masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai kementerian teknis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program BOS.¹¹

Prosedur pengelolaan penerimaan keuangan dilakukan langsung oleh bendahara dengan sistem satu pintu. Bentuk pembukuan pada penerimaan keuangan sekolah juga terbagi dua yaitu buku kas umum dan buku kas harian. Pengalokasian sumber keuangan pula dibagi dua yang terdiri dari 70% untuk kegiatan kesiswaan dan 30% untuk kegiatan SDM (sumber daya manusia). Karena menggunakan sistem satu pintu, maka penanganan pembukuan keuangan sekolah ditangani oleh bendahara sekolah dan diketahui oleh kepala sekolah.

Proses pengelolaan pada segi pengeluaran, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan biaya untuk setiap program. Semua biaya yang dikeluarkan harus sesuai dengan program sekolah, dan pada setiap program sekolah ada pihak yang bertanggungjawab. Pihak yang menjadi penanggungjawab kegiatan adalah para wakil kepala sekolah yaitu wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan wakil kepala sekolah bidang humas (hubungan masyarakat) serta kepala tata usaha. Pengendalian pengeluaran sekolah selalu merujuk pada kebutuhan yang tercantum dalam rencana kegiatan anggaran sekolah. Kendala utama pada pelaksanaan keuangan sekolah

¹¹ Ayu Okvita, "Pengelolaan Dana Bos Sekolah (BOS)" (INA-Rxiv, March 6, 2019), <https://doi.org/10.31227/osf.io/yd4ne>.

yaitu keterbatasan dana dan perubahan harga barang yang semakin naik, sehingga untuk mengatasi masalah tersebut digunakan skala prioritas kebutuhan yang paling mendesak. Pelaksanaan keuangan sekolah hanya ditangani oleh kepala sekolah dan bendahara yang dipertanggungjawabkan kepada yayasan.

3. Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah dapat dilihat pada evaluasi, bentuk pertanggungjawaban dan keterlibatan pengawas eksternal. Evaluasi dilakukan dalam bentuk pengecekan pelaksanaan setiap program sekolah per triwulan atau per enam bulan, yang dilakukan oleh yayasan dan kepala sekolah. Dari hasil evaluasi kemudian dilakukan tindak lanjut untuk meminimalisir kebutuhan yang tidak terlalu penting dan mengefisienkan dana yang dikeluarkan.

Kepala sekolah sangat berperan dalam mengevaluasi setiap kegiatan dengan memberikan pemahaman kepada setiap penanggungjawab kegiatan tentang pengeluaran yang dibiayai, memonitoring, dan membimbing. Selain dari internal, ada juga evaluator eksternal yaitu dari dinas pendidikan dan kebudayaan. Dengan mengecek bukti fisik pengeluaran yang tercantum pada laporan yang terdapat pada kwitansi-kwitansi atau bukti pembelian barang yang dilakukan pada akhir tahun anggaran.

Pertanggungjawaban keuangan sekolah dipertanggungjawabkan kepada kementerian pendidikan nasional dalam bentuk dokumen laporan yang dibuat oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah. Setelah dilaporkan maka tindak lanjut dari pertanggungjawab tersebut yaitu revisi laporan dengan cara menindaklanjuti kegiatan yang belum terlaksana. Bentuk transparansi dapat dilihat pada evaluasi oleh kepala sekolah dan monitoring oleh pihak yayasan.

4. Pengelolaan Dana BOS

4.1 Perencanaan Dana BOS

Perencanaan atau planning sebagaimana dikatakan oleh Luther M. Gulick: "Planning that is working out broad outline the things that need to be done and the methods for doing them to

acomplish the purpose set for enterprise”.¹² Perencanaan pengelolaan dana BOS diawali dengan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dan penyusunan usulan dana BOS atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) BOS. RKAS disusun berdasarkan petunjuk teknis (juknis), dan sumber dana dikelompokkan dalam rencana kegiatan anggaran sekolah termasuk dana BOS dimasukkan dalam RKAS berupa dokumen usulan dana BOS atau RAB BOS. Setiap penyusunan anggaran terutama penyusunan rencana anggaran dana BOS dilakukan melalui rapat dengan melibatkan dewan guru, bendahara sekolah, wakil kepala sekolah, kepala sekolah untuk mendapatkan dana BOS dibutuhkan data siswa dan data siswa miskin penerima Berdasarkan data di atas maka penulis menyimpulkan bahwa perencanaan dana BOS dilakukan dengan menyusun RKAS dan RAB BOS dengan melibatkan dewan guru, bendahara sekolah, wakil kepala sekolah, kepala sekolah, komite sekolah dan yayasan. Pengelolaan dana BOS pada aspek perencanaan tergolong masih perlu diperbaiki khususnya pada kelengkapan administrasi mengenai data siswa yang harus diinput ke aplikasi dapodik.

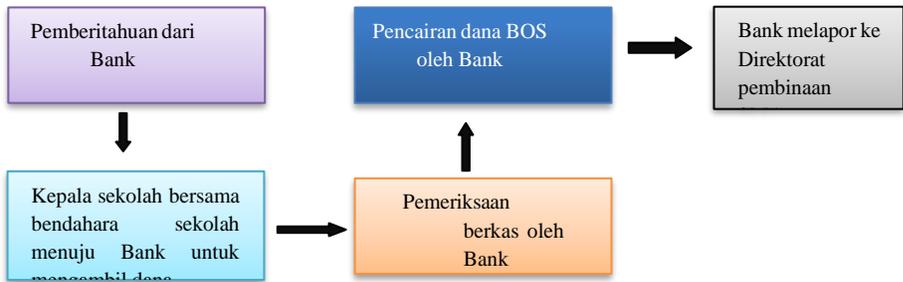
4.2 Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS

Pelaksanaan pengelolaan dana BOS di sekolah dari beberapa bagian yaitu diawali dari tahap penyaluran Dana BOS sekolah, pengambilan dana, penggunaan dana BOS, pembelanjaan dengan dana BOS, pembukuan dana BOS, dan perpajakan terkait pengelolaan dana BOS.

Penyaluran dana BOS dilakukan setiap awal triwulan dan pengambilan dana BOS dilakukan pada akhir bulan oleh kepala sekolah dan bendahara. Akan tetapi pengambilan dana sering terhambat disebabkan lamanya pencairan dana BOS sehingga menyebabkan tidak menentunya pengambilan dana BOS. Penggunaan dana BOS yang diterima digunakan untuk kegiatan proses belajar mengajar dan pengembangan sekolah.

¹² Saukani, Junaidi H. Matsum, and Nuraini Asriati, “EVALUASI PENGELOLAAN DANA BOS DALAM PEMBEBASAN PUNGUTAN SPP SISWA SD GUGUS V TELUK SUAK,” *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa* 3, no. 12 (December 8, 2014), <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/8169>.

Namun, dana BOS yang diterima tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Untuk lebih jelasnya mengenai pencairan dana BOS dapat dilihat pada gambar.



Gambar 2. Pencairan Dana Bos

Berdasarkan pada gambar di atas, dapat diketahui bahwa pencairan dana BOS dilakukan oleh kepala sekolah bersama bendahara sekolah dengan melengkapi berkas persyaratan pencairan dana yaitu SK pengangkatan kepala sekolah, SK pengangkatan bendahara sekolah, akte pendirian sekolah atau surat izin operasional sekolah yang masih berlaku, KTP atau SIM kepala sekolah, KTP atau SIM bendahara sekolah.

4.3 Pengawasan dan Evaluasi Dana BOS

Evaluasi adalah suatu proses perbandingan dan pengukuran dari hasil akhir pekerjaan yang dinyatakan dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai.¹³ Pengawasan dana BOS dilakukan dengan membentuk tim pengawas pengelolaan dana BOS dari yayasan. Selain yayasan, dinas terkait yaitu dinas pendidikan dan kebudayaan juga ikut mengawasi pengelolaan dana BOS di sekolah. Komite sekolah dan yayasan selaku pihak pengawas internal melakukan pengawasan atas terlaksananya pengelolaan dana BOS sesuai dengan perencanaan BOS Monitoring yang dilakukan oleh dinas pendidikan yaitu pada saat

¹³ Yuli Nurhayati and Dondy Ekki Deonardo, "EVALUASI PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SD NEGERI HARAPAN MAKMUR KABUPATEN MUSI RAWAS KECAMATAN MUARA LAKITAN," *Jurnal AkunStie (JAS)* 7, no. 1 (June 19, 2021): 21–30.

periode berjalan pengelolaan dana BOS. Pengawasan dilakukan pada aspek perencanaan dan pengeluaran anggaran. Hasil dari pengawasan itu adalah pengawas merevisi dan mengkoreksi anggaran kegiatan.

PENUTUP

Sistem manajemen keuangan pendidikan dapat dilihat dengan penerapan fungsi-fungsi manajemen keuangan dalam pengelolaan keuangan di sekolah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah yang berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip manajemen keuangan pendidikan.

Pengelolaan dana BOS yang telah dilaksanakan di sekolah adalah (1) perencanaan yang meliputi: penyusunan RKAS dan RAB BOS, (2) pelaksanaan yang meliputi: penyaluran dana BOS, pengambilan dana BOS, penggunaan dana BOS, pembelanjaan dengan dana BOS, pembukuan dana BOS dan perpajakan terkait pengelolaan dana BOS, (3) Pengawasan dan evaluasi yang meliputi: pelaksanaan pengawasan oleh pihak internal dan eksternal dan evaluasi oleh kepala sekolah dan komite sekolah serta yayasan, (4) Pelaporan yang meliputi: pelaporan penggunaan dana BOS dan publikasi penggunaan dana BOS.

REFERENSI

- Fitri, Afrilliana. "Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi." *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan* 2, no. 1 (March 4, 2020): 33–39. <https://doi.org/10.24036/bmp.v2i1.3753>.
- Fitri, Ainul, Murniati, and Bahrin. "Manajemen Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Smp Negeri Di Kota Banda Aceh." *Jurnal Administrasi Pendidikan : Program Pascasarjana Unsyiah* 7, no. 1 (2019). <http://e-repository.unsyiah.ac.id/JAP/article/view/13175>.
- Julaiha, Siti. "Konsep Kepemimpinan Kepala Sekolah." *Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan*

- Pembelajaran* 6, no. 3 (October 10, 2019): 179–90.
<https://doi.org/10.21093/twt.v6i3.1734>.
- Komariah, Nur. “Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan.” *Al-Afkar: Jurnal Keislaman & Peradaban* 6, no. 1 (December 25, 2018): 67–94.
<https://doi.org/10.32520/afkar.v6i1.192>.
- “Majalah JendelaSejarah Dan Peran BOS Bagi Pendidikan Indonesia.” Accessed December 6, 2021.
<https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/berita/detail/sejarah-dan-peran-bos-bagi-pendidikan-indonesia>.
- Muhtar, Muna Aziza, Taufik Bk, and H. Akil. “Perencanaan Keuangan Sekolah Dan Upaya Perbaikan Sistem Manajemen Keuangan Di Ra-Abata Mardhotillah.” *PeTeKa* 4, no. 3 (November 2, 2021): 524–31.
<https://doi.org/10.31604/ptk.v4i3.524-531>.
- Nurhayati, Yuli, and Dondy Ekki Deonardo. “Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Sd Negeri Harapan Makmur Kabupaten Musi Rawas Kecamatan Muara Lakitan.” *Jurnal AkunStie (JAS)* 7, no. 1 (June 19, 2021): 21–30.
- Okvita, Ayu. “Pengelolaan Dana Bos Sekolah (BOS).” *INARxiv*, March 6, 2019.
<https://doi.org/10.31227/osf.io/yd4ne>.
- Rahmah, Nur. “Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Sekolah.” *Kelola: Journal of Islamic Education Management* 1, no. 1 (October 25, 2016): 73–77.
<https://doi.org/10.24256/kelola.v1i1.430>.
- Sandu Siyoto, Dkk. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publising, 2015.
- Saukani, Junaidi H. Matsum, and Nuraini Asriati. “Evaluasi Pengelolaan Dana Bos Dalam Pembebasan Pungutan Spp Siswa Sd Gugus V Teluk Suak.” *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa* 3, no. 12 (December 8, 2014).
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/8169>.
- Surahman dkk. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Tim P2M2, 2016.
- Widyatmoko, Subkhi, and S. Suyatmini. “Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD N Kemas I Surakarta.” *Manajemen Pendidikan* 12, no. 3 (December

28, (2017):
<https://doi.org/10.23917/jmp.v12i3.5528>.

153–60.